

**NASIONALISME
Akar dan Pertumbuhannya di Minangkabau**

Danil Mahmud Chaniago

UIN Imam Bonjol Padang

Email: danilchaniago@uinib.ac.id

Umi Rusmiani Humairah

UIN Imam Bonjol Padang

Email: kabarumi@gmail.com

Rengga Satria

Universitas Negeri Padang,

Email: renggasatria@fis.unp.ac.id.

Abstract

The root of Nationalism in Indonesia might be traced from the beginning of the Islamic reform movement initiated by the Kaum Muda in the early 20th century. After successfully giving birth to many educational institutions, this movement then shifted into a socio-religious and socio-political movement. In politics, it received people's support in every corner of Minangkabau land. The rise of national awareness in Minangkabau was affected by the people's success to thwart the Dutch from implementing Goeroe Ordonantie, i.e. educational regulation to limit the Muslim elites from executing their job as religious teachers.

Keywords: Nationalism, Minangkabau, Permi, Goeroe Ordonantie

Abstrak

Akar Nasionalisme di Minangkabau dapat ditelusuri sejak adanya gerakan pembaharuan Islam yang diinisiasi oleh ulama Kaum Muda pada awal abad ke duapuluh. Setelah sukses melahirkan banyak lembaga pendidikan Gerakan ini kemudian mengalami pergeseran menjadi gerakan Sosio-Agama dan Sosio-Politik. Dalam bidang politik gerakan ini mendapat dukungan masyarakat di seluruh pelosok Minangkabau. Bangkitnya kesadaran kebangsaan di Minangkabau diwarnai oleh keberhasilan masyarakatnya menggagalkan upaya pemerintah kolonial menerapkan Goeroe Ordonantie yakni politik pendidikan yang membatasi gerak kaum elit agama (Islam) dalam menjalankan tugasnya sebagai guru agama.

Kata Kunci: Nasionalisme, Minangkabau, Permi, Goeroe Ordonantie

PENDAHULUAN

Penerapan *politik etis* (*etische politiek*) oleh pemerintah Kolonial Hindia Belanda pada awal abad ke dua puluh mempunyai arti yang sangat penting dan strategis bagi bangsa Indonesia. Sebab, kebijakan itu membuka peluang bagi bangkitnya kesadaran nasional (baca: nasionalisme) bangsa Indonesia. Tanpa disadari oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, *politik etis* telah menstimulasi munculnya elit-elit baru dari kalangan rakyat bumiputera. Elit-elit baru adalah kaum pribumi yang mendapat kesempatan mengasah intelektualitasnya pada sekolah-sekolah pemerintah. *Politik etis* telah mendorong bangkitnya kesadaran di kalangan elit-elit bumiputera berpendidikan barat itu akan harga dirinya selaku orang yang terjajah. Mereka juga kecewa atas realitas sosial yang telah banyak menyengsarakan hidup kaum bumiputera. Oleh karena itu, elit-elit baru ini berupaya untuk membawa bangsanya melepaskan diri dari belenggu kolonialisme. Langkah-langkah strategis segera dilakukan. Kaum elit modern ini menginisiasi antara lain berdirinya berbagai macam organisasi pergerakan, mendirikan sekolah-sekolah bagi kaum bumiputera, dan menerbitkan berbagai media massa. Fenomena social yang menandai perubahan social di kalangan penduduk bumiputera ini muncul di seluruh pelosok nusantara. Dalam berbagai literature Sejarah Indonesia fenomena ini dijadikan sebagai tonggak bangkitnya kesadaran kebangsaan Indonesia. Selain lebih teratur, sistematis, dan mempunyai tujuan yang sama yakni kemerdekaan Indonesia langkah-langkah yang ditempuh oleh kaum elit bumiputera ini dianggap sebagai estafeta perjuangan Bangsa Indonesia yang sebelumnya bersifat kedaerahan. Dari sinilah dimulainya era pergerakan nasional Indonesia yakni suatu pergerakan yang dilakukan secara serentak di seluruh

penjuru nusantara dalam mengusir penjajah dan membangun sebuah *nation*: Indonesia.

Tulisan ini akan mencoba untuk merekonstruksi kembali akar bangkitnya kesadaran kebangsaan Indonesia dan pertumbuhannya. Tulisan ini akan ditutup dengan merekonstruksi kembali dinamika local terkait bangkitnya kesadaran kebangsaan Indonesia. Karena itu, sejak awal disampaikan tulisan ini tidak bermaksud untuk ikut meramaikan diskursus terkait pelopor kebangkitan kesadaran nasional (baca: nasionalisme) Indonesia yang biasanya selalu muncul dalam kajian-kajian tentang bangkitnya nasionalisme Indonesia.

PEMBAHASAN

Nasionalisme: Gambaran Umum

Nasionalisme merupakan manifestasi dari rasa cinta dan kesetiaan kepada tanah air, negara dan bangsa. Nasionalisme merupakan modal utama dalam pembentukan negara dan karakter bangsa. Secara etimologi, akar kata nasionalisme berasal dari kata *nascie* yang berarti dilahirkan, kemudian berkembang dalam Bahasa Inggris dengan kata *natio* yang berarti bangsa yang dipersatukan oleh kelahiran.¹ Kata *isme* sendiri memiliki makna paham dan ajaran. Nasionalisme merupakan paham kebangsaan yang mengandung makna kesadaran cinta tanah air, memiliki kebanggaan sebagai bangsa, memiliki solidaritas dalam satu bangsa dan negara dengan menjunjung nilai-nilai persatuan dan kesatuan.² Nasionalisme dapat juga dipahami sebagai paham kebangsaan dan cinta tanah air yang harus dimiliki oleh warga negara, merasa memiliki sejarah dan

¹Murod, Abdul Choliq. "Nasionalisme dalam Perspektif Islam". *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, vol. 16, No. 2, Agustus 2011, h. 46.

²Mifdal Zusran Alfaqi, "Memahami Indonesia Melalui Perspektif Nasionalisme, Politik Identitas, serta Solidaritas". *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol. 28 No. 2, Agustus 2015, h. 112.

cita-cita yang sama dalam tujuan berbangsa dan bernegara.

Beberapa tokoh telah mendefinisikan dan merumuskan teori nasionalisme. Salah satu tokoh mengemukakan teori nasionalisme di era modern ini adalah Ben Anderson yang mengemukakan gagasannya tentang masyarakat khayalan (*Imagined Communities*). Menurut Anderson³, Nasionalisme adalah “... *It is an Imagined Political Community that is imagined as both inherently limited and sovereign.*” Dalam pandangan Anderson, Nasionalisme Indonesia terbentuk dari Imajinasi akan adanya suatu bangsa mandiri dan merdeka dari penjajahan, disatukan oleh bahasa yang sama yaitu bahasa Indonesia. Adanya kesatuan imajinasi yang lahir karena semangat perlawanan terhadap penjajahan, tentunya tidak lagi relevan dalam memaknai nasionalisme di Indonesia dewasa ini.

Tokoh lain yang membahas nasionalisme diantaranya Hans Kohn, Joseph Stalin, dan Ernest Renan. Hans Kohn menekankan makna Nasionalisme sebagai kesetiaan individu tertinggi kepada negara⁴. Joseph Stalin memaknai nasionalisme sebagai komunitas yang terbentuk dari bahasa, wilayah, ekonomi dan psikologis yang stabil. Ernest Renan mengemukakan nasionalisme sebagai solidaritas yang dijalankan oleh warga negara untuk secara bersama membentuk identitas kolektif baru yang melampaui gari-garis sektarian.⁵

Abdul Munir Mulkan mendefinisikan Nasionalisme sebagai sebuah gagasan mengenai kesatuan kebangsaan dalam suatu wilayah politik

kenegaraan.⁶ Sartono Kartodirdjo menjelaskan Nasionalisme dengan lebih rinci. Menurutnya, nasionalisme merupakan ideologi yang memiliki lima prinsip dasar yaitu; kesatuan, kemerdekaan, persamaan, kepribadian dan performnace/kualitas dari bangsa lain.⁷

Pandangan beberapa tokoh diatas mengenai nasionalisme terdapat perbedaan satu sama lain. Namun dapat dipahami ada beberapa pandangan kunci yang memiliki kesamaan dalam melihat nasionalisme, seperti; kesadaran persatuan dan kesatuan sebagai upaya mewujudkan cita-cita bersama dalam bingkai kebangsaan dan kenegaraan. Selain itu, secara sederhana istilah nasionalisme dapat dipahami sebagai paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara atas kesadaran sebagai warganegara yang secara potensial bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, dan integritas bangsanya.

Nasionalisme merupakan paham dan kajian yang muncul secara global pada abad ke 18 Masehi. Fukuyama mengemukakan tokoh-tokoh yang dianggap sebagai pencetus teori nasionalisme pada abad ke 18 Masehi adalah Von Herder (1774-1803), Rousseau (1712-1778) dengan teorinya tentang bangsa dan Fiederich Hegel yang dikenal dengan teorinya tentang negara.⁸ Teori Nasionalisme yang dikemukakan oleh para tokoh ini tentu berdasarkan pengalaman bangsa Eropa yang mengalami masa transisi dari masyarakat feodal menuju masyarakat industri. Kekuasaan feodal monarki (raja, bangsawan dan gereja) tidak mampu menghadapi masyarakat baru yang menguasai modal, industri dan

³ Benedict Anderson, *Imagined Communities: Reflection on the Origin and Spread of Nationalism*, (London and New York: Verso, 1991)

⁴Hans Kohn, *Nasionalisme: Arti dan Sejarahnya*, terj. (Jakarta: Erlangga, 1984)

⁵Abdul Choliq Murod, “ Nasionalisme dalam Perspektif Islam”. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, vol. 16, No. 2, Agustus 2011, 47.

⁶Abdul Munir Mulkhan, *Nasionalisme; Refleksi Kritis Kaum Ilmuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 14.

⁷ Sartono Kartodirdjo, *Pembangunan Bangsa*, (Yogyakarta: Adutya Media, 1993).

⁸ Francis Fukuyama, *Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal*, terj. (Yogyakarta: Qalam, 2004), h. 3.

ilmu pengetahuan. Kekalahan kekuasaan monarki melahirkan semangat nasionalisme (*nation-state*). Peristiwa panjang yang terjadi di Eropa ini kemudian disebut dengan revolusi industri atau *renaissance*.

Kesadaran dan semangat nasionalisme yang dikemukakan oleh para tokoh awal merupakan penyatuan dari beberapa komponen dasar, seperti; rasa kekeluargaan, hubungan yang erat sekelompok orang dengan orang lain, dan rasa terikat pada suatu kekuasaan.

Semangat dan kesadaran Nasionalisme dalam konteks Indonesia, tidak bisa terlepas dari semangat perlawanan terhadap penjajahan (*kolonial*) Belanda. Akar perlawanan terhadap kolonial Belanda dimulai sejak munculnya V.O.C (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) pada permulaan abad ke 17 Masehi.⁹ usaha dagang milik kolonial Belanda ini melakukan eksplotasi terhadap sumber daya alam Indonesia dan monopoli dagang yang merugikan masyarakat pribumi.

Tercatat ada beberapa gerakan perlawanan yang cukup besar terhadap kolonial Belanda ini seperti; perang Paderi (1821-1837) di Minangkabau, Perang Diponegoro (1825-1830) di Jawa Tengah, Perang Aceh (1872-1912). Peperangan yang terjadi pada Abad ke 19 Masehi ini berakhir dengan kekalahan masyarakat pribumi Indonesia. Perlawanan terhadap kolonial Belanda dalam bentuk peperangan di beberapa daerah tersebut belum lah dilandasi oleh semangat nasionalisme dan kesadaran akan kesatuan bangsa, tetapi hanya perlawanan berdasarkan semangat *primodial* dan kesukuan. Ketiadaan semangat nasionalisme bisa jadi menjadi penyebab utama kekalahan masyarakat pribumi Indonesia dalam peperangan Paderi, Diponegoro dan Aceh tersebut.

Pada abad ke 20 Masehi, kesadaran masyarakat pribumi Indonesia memiliki kesadaran Nasionalisme ditandai dengan pergeseran bentuk gerakan perlawanan terhadap kolonial Belanda, dari gerakan perlawanan fisik (peperangan) menuju gerakan perlawanan dalam bentuk sosio-agama dan sosio-politik. Perhimpunan Indonesia merupakan salah satu organisasi sosial yang *concern* dalam melakukan penyebaran ide-ide nasionalisme. Sartono¹⁰ mengemukakan manifesto politik Perhimpunan Indonesia yang sangat sarat dengan semangat nasionalisme, yaitu; *pertama*, rakyat Indonesia harus diperintah oleh pemerintah yang dipilih sendiri. *Kedua*, dalam memperjuangkan tujuan tersebut, rakyat tidak boleh mengharapkan bantuan pihak lain. *Ketiga*, untuk mensukseskan perjuangan itu, rakyat harus bersatu. Semangat nasionalisme ini semakin menemukan momentumnya pada peristiwa sumpah pemuda pada 28 Oktober 1928. Puncak kemenangan perlawanan terhadap kolonial berdasarkan semangat nasionalisme ditandai dengan dibacakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarna-Hatta pada 17 Agustus 1945. Kemudian, semangat dan kesadaran nasionalisme rakyat Indonesia dikonseptualisasikan melalui Pancasila dan UUD 1945.

Dewasa ini, memasuki abad 21 Masehi ini makna nasionalisme tentu tidak lagi menemukan relevansinya dalam perlawanan terhadap kolonial Belanda. Nasionalisme menghadapi tantangannya dalam dinamika global yang tidak bisa dihentikan. Globalisasi menimbulkan pergeseran otoritas dari negara-bangsa (*nation-state*), sementara pada waktu bersamaan gerakan separatis, konflik antar etnis dan agama muncul kembali. Snyder merinci kecenderungan ancaman dan tantangan nasionalisme ini sebagai berikut;

⁹Susmihara. "Islam dan Nasionalisme di Indonesia: Sebuah Tinjauan Sejarah". *Jurnal Rihlah*, vol. 4, No.1, 2016, h. 52.

¹⁰ Sartono Kartodirdjo, *Pembangunan Bangsa*, (Yogyakarta: Aditya Media,1993), h. 42.

Pertama, meningkatnya komunikasi lintas budaya global yang menyebabkan mudahnya konsep identitas. *Kedua*, bergabungnya isu-isu domestik dan internasional yang akan mendorong proses Internasionalisasi. *Ketiga*, kegagalan negara dalam menghadapi persoalan global seperti isu lingkungan hidup, wabah penyakit dll. *Keempat*, ketidakmampuan negara memberikan perlindungan secara menyeluruh kepada rakyatnya. *Kelima*, Nasionalisme memiliki cacat sejarah sebagai pemicu konflik. *Keenam*, perusahaan multinasional mengakhiri ide ekonomi nasional.¹¹

Melacak Bangkitnya Kesadaran Kebangsaan Indonesia

Memasuki abad ke-XX rakyat Indonesia memasuki fase baru dalam kehidupan berbangsa. Banyak perubahan yang terjadi di Indonesia yang ketika itu masih bernama Hindia Belanda. Meskipun perubahan itu lebih dirasakan oleh sebagian kecil rakyat bumiputera terutama kalangan elit tradisional yang pandai baca tulis namun efek perubahan itu sangat dirasakan oleh hampir seluruh rakyat bumiputera.¹² Perubahan-perubahan yang ditunjang oleh munculnya berbagai inovasi di berbagai bidang itu menandakan bangkitnya kesadaran baru di kalangan rakyat bumiputera agar bisa hidup secara layak. Pada gilirannya, inovasi-inovasi itu mendorong munculnya transformasi social dan budaya yang sebelumnya tidak pernah dirasakan oleh penduduk bumiputera.¹³ Perubahan-perubahan itulah yang

kemudian memicu bangkitnya kesadaran kebangsaan penduduk bumiputera (baca: Indonesia).

Salah satu perubahan yang kelak membuka jalan bagi bangkitnya nasionalisme Indonesia adalah pada bidang transportasi laut. Keberadaan kapal laut memberikan kemudahan bagi rakyat bumiputera untuk bepergian lebih cepat dan lebih jauh lagi, dan menjangkau berbagai tempat, baik dalam maupun luar negeri. Kecuali itu, transportasi laut ini juga mempercepat arus perdagangan internasional. Pada gilirannya, transportasi laut ini menjadi pemicu munculnya transformasi dalam nilai-nilai spiritual.¹⁴ Sebab, keberadaan kapal laut semakin mempermudah, mempercepat, dan semakin mempermudah perjalanan ibadah haji ke Mekkah. Artinya, keberadaan kapal laut ini menjadi faktor menentukan dalam peningkatan jumlah haji di kalangan penduduk bumiputera. Ibadah haji memungkinkan penduduk bumiputera berinteraksi dan bertukar informasi dengan banyak orang dari berbagai negara yang mungkin saja mengalami penderitaan sebagai bangsa terjajah. Tentu saja hal ini sangat mencemaskan pemerintah kolonial.

Keberadaan kereta api pada pertengahan abad ke-19 juga membuka kesempatan penduduk bumiputera untuk bisa menikmati transportasi moderen ketika itu. Kecuali itu, keberadaan kereta api sebagai transportasi umum juga memudahkan penyebaran atau sirkulasi surat kabar yang ketika sedang *booming*.¹⁵ Sejak itu penduduk Hindia Belanda semakin

¹¹ Grendi Hendrastomo. "Nasionalisme VS Globalisasi: Hilangnya Semangat Kebangsaan dalam Perdaban Modern". *Jurnal Dimensia*, vol. 1, No, 1, Maret 2017, h. 8.

¹² Ahmat Adam, *The Vernacular Press and the Emergence of Modern Indonesia Consciousness 1855-1913* (Ithaca, New York: Southeast Asia Program Cornell University, 1995), h. 79.

¹³ Lihat dalam Sartono Kartodirdjo, *Perkembangan Peradaban Priyayi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1987), h. 166.

¹⁴ Bedjo Riyanto, *Iklan Surat Kabar dan Perubahan Masyarakat di Jawa Masa Kolonial 1870-1915* (Yogyakarta: Tarawang, 2000), h. 173.

¹⁵ Catatan Elliot menunjukkan bahwa sampai pertengahan abad ke-19 Hindia Belanda diramaikan oleh terbitnya sekitar 30 surat kabar yang sebagian besarnya adalah pers kolonial. Elliot Parker, "Indonesia", dalam Kurian, *Wordl Press Encyclopaedia* (London: Mansell, 1982), h. 498.

mudah mendapatkan informasi. Proses perubahan sosial yang sedang terjadi dengan mudah dapat diikuti dan dirasakan oleh penduduk bumiputera.

Keberadaan kedua transportasi umum itu telah membuat penyebaran berita dan ide-ide baru melalui surat kabar menjadi lebih efisien. Sejak itu pertumbuhan surat kabar semakin meluas, tidak hanya di kalangan bangsa Eropa, dan Tionghoa Peranakan saja melainkan juga kalangan bumiputera.

Perubahan-perubahan dan perkembangan sebagai yang disebut tadi mendapat perhatian besar dari kaum terpelajar bumiputera yang mendapat pendidikan Barat. Kaum elit minority di kalangan rakyat bumiputera ini menyadari bahwa masyarakat Hindia Belanda tengah menikmati kemajuan. Karena itu, mereka bertekad untuk mengejar kemajuan bagi bangsanya. Tujuannya, agar penduduk bumiputera dipandang sebagai bangsa yang bermartabat dan tujuan itu akan dapat dicapai jika rakyat bumiputera mendapat pengetahuan seluas mungkin melalui pendidikan formal.

Obsesi kaum intelektual bumiputera itu baru terwujud setelah pemerintah kolonial menerapkan suatu kebijakan baru pada permulaan abad ke duapuluh. Dalam sejarah Indonesia kebijakan baru ini dikenal sebagai *Politik Etis*. *Politik Etis* memuat pokok-pokok pikiran *de nieuwe koers* (arah baru) yang akan ditempuh oleh de koloniale politiek (politik jajahan).¹⁶

¹⁶ *Politik Etis* merupakan kebijakan pemerintah menyangkut irigasi, transmigrasi dan edukasi. Ketiganya dilaksanakan secara bersamaan dengan biaya yang cukup besar. Pemerintah memperbanyak bangunan-bangunan irigasi dan transmigrasi dilakukan untuk mengurangi kepadatan penduduk di Jawa. Dalam bidang edukasi pemerintah memberi kesempatan yang lebih luas kepada penduduk pribumi untuk menikmati pendidikan formal di sekolah-sekolah pemerintah. Bahkan tidak sedikit kaum bumiputera yang mendapat beasiswa untuk sekolah ke Belanda. Lebih jauh mengenai hal ini lihat umpamanya dalam Robert van Niel, *Munculnya Elit Moderen Indonesia*, terj. Zahara D. Noer, (Jakarta: Pustaka

Konsekuensi logis dari kebijakan baru itu adalah, semakin banyak elit-elit baru berpendidikan Barat dari kalangan penduduk bumiputera. Elit-elit baru ini sangat menyadari harga dirinya dan merasa kecewa atas realitas yang sedang dihadapi dari situasi kolonial.¹⁷

Dalam waktu yang tidak begitu lama elit baru ini melakukan langkah-langkah pembaharuan yang ditujukan untuk melepaskan diri dari penjajahan. Pemikiran inilah yang kemudian mendorong munculnya berbagai macam organisasi pergerakan seperti Budi Utomo (1908) dan Sarikat Dagang Islam (1911), Muhammadiyah (1912), - Indische Party (1912), Partai Komunis Indonesia (1920), Partai Nasional Indonesia (1927), dan lain-lain. Kemunculan organisasi-organisasi ini menandakan bangkitnya nasionalisme Indonesia dalam pengertian moderen.¹⁸ Meskipun bentuk nasionalisme yang pertama kali muncul di Indonesia tidak sepenuhnya dalam pengertian politik tetapi dalam sosial kemasyarakatan namun lahirnya organisasi-organisasi pergerakan itu merupakan fenomena nyata kebangkitan kesadaran berbangsa dan bernegara di kalangan bangsa Indonesia. Dalam sejarah nasional Indonesia fase ini dikenal sebagai era Pergerakan Nasional yaitu suatu pergerakan yang bertujuan untuk mengusir penjajah dan membangun sebuah nation. Biasanya pembentukan sebuah nation selalu dihubungkan dengan adanya berbagai persamaan seperti bahasa, wilayah, sejarah dan, agama. Akan tetapi nasionalisme Indonesia tidaklah demikian, sebab tidak ada persamaan pada keempat unsur tersebut. Nasionalisme Indonesia

Jaya, 1984), h. 51 dan Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda: Kantoer Voor Inlandsche Zaken*, (Jakarta: LP3S, 1985), h. 100.

¹⁷ R.Z. Leirissa, *Terwujudnya suatu Gagasan Sejarah Masyarakat Indonesia 1900-1950* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985) h. 21.

¹⁸ Badri Yatim, *Soekarno, Islam dan Nasionalisme* (Jakarta: Logos, 1999), h. 18.

lebih disebabkan oleh peristiwa sejarah, dalam hal ini penjajahan bangsa asing.¹⁹

Dalam waktu singkat bangkitnya kesadaran kebangsaan rakyat Indonesia menggema ke pelosok Nusantara, tidak kecuali Sumatera Barat. Bahkan, semangat nasionalisme masyarakat daerah ini berkembang dengan cepat. Sebagaimana daerah lainnya, semangat kebangsaan Indonesia ditularkan melalui berbagai media massa yang muncul berbarengan dengan bangkitnya kesadaran nasional rakyat Indonesia. Khusus di Sumatera Barat, rakyatnya semakin mengerti akan pentingnya perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Pertumbuhan Nasionalisme Indonesia di Minangkabau

Bagian ini akan membahas tentang gerakan keagamaan dan gerakan kebangsaan di Sumatera Barat. Kedua gerakan itu muncul bersamaan dengan bangkitnya kesadaran kebangsaan rakyat Indonesia. Gerakan yang pertama dikenal sebagai gerakan pembaharuan Islam yang disebut sebagai embriyo bangkitnya kesadaran nasional orang Minangkabau. Gerakan berikutnya adalah gerakan perlawanan masyarakat Minangkabau terhadap pemerintah kolonial sebagai bentuk dari bangkitnya semangat kebangsaan masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat.

Gerakan Pembaharuan Islam: Akar Nasionalisme di Minangkabau

Pembahasan bagian ini akan dibagi kepada dua bahagian yakni gerakan pembaharuan Islam dan muncul organisasi politik Persatuan Muslim Indonesia (Permi) yang merupakan konsekuensi logis dari bangkitnya gerakan pendidikan Islam di Sumatera Barat.

1. Gerakan Pembaharuan Islam

¹⁹ Leo Suryadinata, "Tjiri-Tjiri Chas Pergerakan Nasional Indonesia sebelum Perang", *Makalah Seminar Nasional II 26-29 Agustus 1970 di Yogyakarta*, h. 1.

Dalam sejarah Minangkabau gerakan ini disebut sebagai *Gerakan Padri*²⁰ yakni gerakan yang bertujuan menata suatu komunitas masyarakat Islam Minangkabau yang didalamnya bebas dari segala *patologi* sosial yang sangat meresahkan masyarakat, seperti judi, sabung ayam, minum-minum tuak, madat dan lain-lain. Dalam perkembangannya militansi *Gerakan Padri* mendapat perlawanan dari kaum adat yang justru mendukung perilaku sosial yang ditentang *Kaum Padri*. Akibatnya muncul konflik dan krisis dalam masyarakat Minangkabau. Konflik yang banyak menguras waktu dan memakan banyak korban di kedua pihak ini kemudian menjelma menjadi *Perang Padri* sejak diintervensi oleh Belanda pada tahun 1821.²¹ Perang berakhir pada tahun 1837 dengan kemenangan dipihak Belanda. Sejak itu wilayah Minangkabau menjadi koloni Belanda.

Kendatipun *Perang Padri* telah berakhir dan Belanda dapat berkuasa di Minangkabau, namun semangat perjuangan *Kaum Padri* untuk pemurnian ajaran Islam tidak pernah padam. Oleh karenanya meskipun secara fisik Belanda berhasil mematahkan perlawanan *Kaum Paderi* namun semangat pembaharuan yang telah dirintis oleh tokoh-tokoh *Padri* terus berlanjut. Hal ini terlihat dengan bergejolaknya

²⁰ Dalam literatur tradisional Minangkabau terdapat istilah *kaum putih* dan *kaum hitam*. Istilah yang pertama dilekatkan pada kaum agama dan yang kedua dilekatkan pada kaum adat. Istilah *Padri* dalam tulisan ini mengikut kepada pendapat Schrieke. B.J.O. Schrieke, *Pergolakan Agama di Sumatera Barat: Sebuah Sumbangan Bibliografi*, terj. Soeganda Purbakawatja, (Jakarta: Bhratara, 1973), h. 12.

²¹ Terlibatnya Belanda dalam konflik internal masyarakat Minangkabau adalah atas permintaan kaum adat yang merasa kewalahan menghadapi *Kaum Padri*. M.D. Mansoer (dkk), *Sedjarah Minangkabau*, (Jakarta: Bhratara, 1970), h. 132.

kembali semangat pembaharuan Islam pada awal abad ke duapuluh. Gerakan pembaharuan tahap ke dua ini dipelopori oleh sekelompok ulama Minangkabau yang dikenal sebagai *Kaum Muda*.

Aktor intelektual dari gerakan ini adalah Syekh Ahmad Khatib (selanjutnya disebut Ahmad Khatib). Pada intinya gerakan yang diinisiasi oleh Ahmad Khatib ingin menghapuskan segala macam *taqlid* terhadap tradisi yang dianut ketika itu. Beberapa orang murid Ahmad Khatib yang berasal dari Minangkabau, seperti Syekh Haji Abdul Malik Karim Amrullah (selanjutnya disebut Haji Rasul), Syekh Haji Abdullah Ahmad, Syekh Haji Thaib Umar, Syekh Haji Jamil Jambek, Syekh Haji Ibrahim Musa, dan Syekh Haji Abbas Abdullah²² dikenal sebagai ulama yang mentransformasikan ide-ide pembaharuan itu ke seluruh *Alam Minangkabau*.

Sebagai basis pergerakannya *Kaum Muda* mendirikan sekolah-sekolah agama yang berbeda gaya dan metodenya dengan lembaga pendidikan agama tradisional yakni *surau*. Perbedaan-perbedaan tersebut antara lain pada sekolah-sekolah yang didirikan *Kaum Muda* ini mempergunakan sistim klasikal hampir mirip dengan sekolah-sekolah milik pemerintah kolonial. Selain itu, pelajaran yang diberikan tidak hanya menyangkut agama tetapi juga ilmu-ilmu umum.

Langkah-langkah *Kaum Muda* dalam menyebarkan ide-ide pembaharuannya mendapat reaksi dan tantangan yang cukup keras dari kalangan ulama-ulama tradisional yang ingin mempertahankan keadaan

lama yang dipandang sudah mapan. Kelompok penentang inilah yang dikenal sebagai *Kaum Tua*. Pangkal pertentangan itu adalah dalam soal *tarekat*. *Kaum Tua* yang penganut *tarekat* lalu bangkit untuk menangkis kecaman-kecaman *Kaum Muda*. Akibatnya timbulah debat dan polemik yang berkepanjangan.²³ Polemik antara *Kaum Muda* dan *Kaum Tua* pada gilirannya melahirkan kepustakaan yang menjadi mutiara yang tinggi nilainya bagi generasi berikutnya.

2. Gerakan Nasionalisme di Minangkabau

Sebagaimana telah disebutkan, bahwa gerakan pembaharuan Islam yang dipelopori *Kaum Muda* di Minangkabau telah membawa dampak khususnya pada bidang pendidikan di daerah ini. Hal ini nampak dari munculnya lembaga-lembaga pendidikan Islam moderen. Madrasah Sumatera Thawalib adalah salah satunya dan yang paling berpengaruh. Dikatakan demikian sebab keberadaannya berhubungan langsung dengan bangkitnya kesadaran nasional di Minangkabau.

Sumatera Thawalib adalah transformasi dari *Surau Jembatan Besi* yang didirikan oleh Syekh Abdullah Ahmad pada akhir abad ke sembilanbelas dan dilanjutkan oleh Haji Rasul pada tahun 1906. Pada tahun 1915 para pelajar *Surau Jembatan Besi* mendirikan organisasi pelajar yang diberi nama *Persaiyoan*.²⁴ Pada tahun 1918

²³Selengkapnya tentang polemik ini, lihat Sanusi Lathief, "Gerakan Kaum Tua Minangkabau", *Disertasi*, (Jakarta: Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1988), khususnya pembahasan BAB.VIII dan XI.

²⁴*Persaiyoan* berasal dari bahasa Minangkabau yang berarti *seiya sekata*. Perkumpulan ini semacam koperasi yang menyediakan kebutuhan sehari-hari para pelajar, seperti buku, pensil, sabun, dan lain-lain. Perkumpulan ini dikenal juga sebagai Perkumpulan Sabun. Sebagian keuntungan

²² Mengenai biografi ulama-ulama ini lihat, Edwar (ed.), *Riwayat Hidup dan Perjuangan 20 Ulama Besar Sumatera Barat*, (Padang: Islamic Centre Sumatera Barat, 1981), h: 123-136, 107-122, 87-98, 55-66, 137-156, dan 157-166.

organisasi ini diganti namanya menjadi Sumatera Thawalib.²⁵ Pendirian Sumatera Thawalib kemudian menginspirasi ulama kaum muda lainnya untuk merubah nama *surau* mereka dengan nama yang sama, Sumatera Thawalib. Sampai tahun 1920-an Sumatera Thawalib telah tersebar hampir di seluruh pelosok *Alam Minangkabau*. Meskipun di antara sekolah-sekolah tersebut tidak ada hubungan antara satu dengan lainnya karena masing-masing masih berdiri sendiri-sendiri, namun gejala-gejala persatuan sudah mulai nampak pada diri pengurus-pengurus dan murid-muridnya. Inilah embrio dari bangkitnya nasionalisme di Minangkabau kemudian hari.

Berbarengan dengan merebaknya pengaruh pergerakan nasional ke Minangkabau pada awal-awal tahun 1920-an pelajar-pelajar Sumatera Thawalib pada tanggal 22 Januari 1922 membentuk Dewan Pusat Sumatera Thawalib. Dewan inilah yang mempersatukan seluruh pelajar-pelajar Sumatera Thawalib yang ada.²⁶ Sejak itu Sumatera Thawalib telah berkembang menjadi organisasi yang besar dan tumbuh menjadi lembaga pendidikan sekaligus organisasi pendidikan.

Konferensi Sumatera Thawalib di Bukittinggi pada tanggal 20-21 Mei 1930²⁷ memutuskan pergantian nama organisasi Sumatera Thawalib menjadi Persatoean Moeslim

Indonesia (P.M.I).²⁸ Ini menandakan wadah baru bagi pergerakan rakyat Minangkabau untuk kemerdekaan Indonesia telah bertambah. Salah satu peserta konferensi yakni Ijas Jacoub, mengusulkan agar P.M.I. memakai asas *Islam dan Kebangsaan*.²⁹ Usul ini disetujui dan ditetapkan dalam statuta P.M.I dalam konferensi berikutnya di Payakumbuh pada tanggal 5-9 Agustus 1930. Sejak itu di Minangkabau telah hadir suatu ideologi baru bagi pergerakan nasional Indonesia.

Konferensi P.M.I tanggal 24 Oktober-1 November di Padang antara lain memutuskan untuk mengganti inisial P.M.I menjadi Permi. Pergantian inisial ini seiring dengan bergantinya haluan organisasi yang semula sosial kemasyarakatan menjadi organisasi politik yang non-kooperatif. Jika sebelumnya tujuan P.M.I. adalah mengusahakan kemajuan dan membawa kepada kesentosaan dan kemuliaan dengan jalan yang syah, maka setelah menjadi Permi tujuannya adalah kesentosaan bangsa dan tanah air serta kesempurnaan dan kemuliaan Islam.³⁰ Permi menjadi wadah bagi masyarakat Minangkabau umumnya yang cenderung kepada politik. Menurut Burhanudin Daya, Permi mempunyai ciri-ciri khusus menyangkut orang Minangkabau sendiri. Permi merupakan partai rakyat yang dapat

koperasi ini dipergunakan untuk membayar guru-guru.

²⁵Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES, 1996), h. 55.

²⁶Taufik Abdullah, *Schools and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatra 1927-1933*, (Ithaca, New York: Cornell University, 1971), h. 36.

²⁷Konferensi ini dihadiri oleh sekitar 2.500 orang utusan, termasuk dari wakil pemerintah; 27 orang dari pers; 29 orang dari berbagai organisasi. Lihat, Burhanuddin Daya, *Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam: Kasus Sumatera Thawalib*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990), h. 269.

²⁸ Pergantian nama ini dimaksudkan supaya organisasi ini menjadi lebih terbuka bagi seluruh rakyat Indonesia. Politiek Politionale Overzich van de Resident Sumatra Westkust 2de Kwartal 1930, *Maillrapport* no. 812/30, ANRI No.9, dan *Medan Ra'jat*, No.2, 10 September 1932, h. 1.

²⁹*Medan Ra'jat*, No. 9, 20 November 1932, h.5.

³⁰*Medan Ra'jat*, No. 2, 10 September 1932, h. 1.

mempersatukan segala golongan muslim.³¹

Dalam waktu yang tidak begitu lama Permi telah dapat melebarkan sayapnya tidak hanya ke pelosok-pelosok Minangkabau tetapi juga sampai ke Aceh, Tapanuli, Bengkulu, dan Sumatera Selatan.³² Penelitian Ricklefs menunjukkan hingga pertengahan Juli 1933 tercatat tidak kurang dari 200 Cabang Permi di 180 *nagari*. Pada beberapa tempat dalam satu *nagari* terdapat lebih dari satu cabang Permi. Kaum perempuan juga banyak yang bergabung dengan Permi. Sampai dengan tahun 1933 Permi memiliki tidak kurang 10.000 dan Permi 40 persennya adalah perempuan.³³ Hal ini menggambarkan, bahwa antusias masyarakat Minangkabau terhadap organisasi pergerakan cukup tinggi.

Dalam rangka mensosialisasikan ide-ide pergerakannya Permi mengambil alih penerbitan Majalah *Medan Ra'jat* milik Iljas Jacoub. Melalui majalah ini Permi dapat menyebarluaskan ide-ide pergerakannya tidak hanya di Minangkabau tetapi daerah-daerah lainnya di Nusantara. Bahkan sampai ke Semenanjung Malaya. Selain melalui jalur media masa, ide-ide perjuangan Permi juga disampaikan melalui lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan dan rapat-rapat umum terbuka (*openbare vergaadering*). Dalam pidato politiknya, orator-orator Permi senantiasa mengumandangkan cita-cita nasional yakni kemerdekaan Indonesia.

³¹ Daya, *Gerakan Pembaharuan.....*, h. 278.

³² Sidi Ibrahim Boechari, *Pengaruh Timbal Balik antara Pendidikan Islam dan Pergerakan Nasional di Minangkabau*, (Gunung Tiga: Jakarta, 1981), h. 158

³³ M.C.Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, terj. Dharmono Hardjowidjono, (Jogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993) h. 286.

Kecenderungan Permi melancarkan propaganda-propaganda politiknya pada gilirannya membuat pemerintah kolonial Hindia Belanda memberlakukan *vergaderverbod* pada organisasi ini tahun 1933. selain itu, aktifitas Permi di tengah masyarakat dibatasi dan kepada beberapa tokohnya dikenakan *sprekdelict*. Bahkan tidak sedikit tokoh-tokoh Permi yang ditangkap dan dipenjarakan dan selanjutnya dibuang keluar Minangkabau. Sejak itu kegiatan Permi lebih sering dilakukan secara tersembunyi. Dalam kondisi seperti inilah tampil Ratna Sari seorang tokoh Permi Putri memimpin Permi lantaran tidak seorang pun dari kaum pria Permi yang berani tampil. Namun hal ini hanya sementara saja. Sebab tanggal 18 Oktober 1937 setelah mendapat tekanan-tekanan yang cukup berat Permi dibubarkan pemerintah.³⁴

3. Gerakan Perlawanan

Berbagai pemberontakan dan atau perlawanan rakyat yang terjadi pada pertengahan abad ke-19 hingga awal abad ke-20 di Hindia Belanda membuat berang penguasa ketika itu. Peristiwa-peristiwa tersebut timbul dari adanya ketidakpuasan masyarakat di bidang sosial, ekonomi, dan politik yang dirumuskan dalam bentuk ideologi keagamaan. Elit-elit agama Islam adalah aktor sekaligus pemimpin gerakan perlawanan itu. Dalam pandangan Sartono³⁵ gerakan perlawanan yang dipimpin oleh tokoh-tokoh Islam itu dapat dikategorikan sebagai *Gerakan Ratu Adil*. Tujuannya adalah munculnya jaman keemasan yang memberi kemakmuran kepada seluruh penduduk pribumi.

³⁴ Taufik Abdullah, *Schools and Politics.....*h. 224.

³⁵ Sartono Kartodirdjo, *Gerakan Ratu Adil*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1984).

Tampilnya elit-elit agama sebagai penggerak sekaligus pemimpin perlawanan menyadarkan pemerintah Hindia Belanda, bahwa elit agama Islam itu mempunyai potensi yang sangat besar dalam menggerakkan aksi massa. Bagi pemerintah, hal itu bahaya laten dan harus segera dihentikan. Karena itu, pemerintah kolonial mengeluarkan kebijaksanaan politik yang dapat mempersempit ruang tokoh-tokoh dan atau guru-guru agama Islam yang dianggap sebagai sumber perlawanan. Salah satu kebijaksanaan itu adalah *Goeroe Ordonantie*. *Goeroe Ordonantie* dibuat di Bogor pada tanggal November 1905 dan diterbitkan pada tanggal 19 November 1905. Ordonansi ini terdiri dari 6 pasal dan tercantum dalam *Staatsblad van Nederlandsch Indie* nomor 550 tahun 1905.³⁶

Ordonansi itu antara lain menyebutkan adanya keharusan untuk mendapat ijin tertulis dari pemerintah setempat bagi setiap guru agama (ulama) sebelum menjalankan tugasnya. Selain itu, guru agama diharuskan membuat daftar nama murid-murid menurut format yang telah ditentukan. Daftar tersebut harus diserahkan secara periodik kepada pemerintah setempat. Peraturan ini sangat memberatkan, sebab tidak semua guru agama pandai membaca dan menulis huruf latin. Kecuali itu, tidak semua yang

pandai menulis memiliki mesin ketik untuk digunakan mengisi blangko.

Jawa dan Madura dipilih sebagai tempat pertama diterapkannya ordonansi itu. Tidak ada reaksi yang berarti dari kalangan masyarakat Islam di kedua tempat itu.³⁷ Oleh karena itu pemerintah mengembangkan ordonansi tersebut ke luar Jawa dan Madura pada tahun 1920. Menyadari adanya kelemahan dalam ordonansi itu, maka pada tahun 1925 pemerintah melakukan revisi. Semula *Goeroe Ordonantie* terdiri dari 6 pasal setelah direvisi menjadi 12 pasal.³⁸ Dalam edisi revisi ini guru agama tidak lagi harus mendapat izin pemerintah setempat sebelum menjalankan tugasnya, tetapi cukup memberi tahu. Edisi revisi ini antara lain menyebutkan ordonansi ini dikeluarkan untuk seluruh wilayah Hindia Belanda, sedangkan ordonansi sebelumnya hanya berlaku khusus di Jawa dan Madura kecuali Yogyakarta dan Surakarta.

Meskipun demikian umat Islam Indonesia tetap merasa keberatan terhadap ordonansi tersebut. Sebab, ordonansi tersebut dicurigai sebagai kelicikan pemerintah kolonial untuk mencegah perkembangan Islam khususnya bidang pendidikan. Meskipun pada beberapa daerah ordonansi tersebut dapat diterapkan namun Partai Syarikat Islam dan Muhammadiyah menolak keras.³⁹

Pada Bulan Juni 1928 pemerintah bermaksud untuk menerapkan *Goeroe Ordonantie* di

³⁶ Pasal 1 yang merupakan inti dari ordonansi itu berbunyi : (1) Untuk pemberian pengajaran agama Islam diwajibkan adanya izin tertulis dari regent atau Patih dari pemerintahan yang berdiri sendiri, atau apabila di daerah itu tidak ada pejabat tersebut izin diberikan oleh Kepala Pemerintahan daerah. (2) Izin tersebut hanya diberikan jika: pemohon mempunyai nama dan reputasi baik dan dasar pemberian pengajaran tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Tidak bertentangan dengan keadaan-keadaan khusus yang di tentukan oleh kepala Pemerintahan Daerah.

³⁷ Untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat Islam di Jawa dan Madura, lihat Hamka, *Ayahku: Riwayat Hidup DR. H. Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera*, (Jakarta: Umminda, 1982), h. 166, dan Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda: Kantoer voor Indlandsche Zaken*, (Jakarta: LP3ES, 1985), h. 53.

³⁸ *Staatsblad van Nederlandsch Indie* No. 219, tahun 1925.

³⁹ Abdullah, *Schools and Politics....*, h. 112 dan Noer, *Gerakan Islam.....*, h. 195.

Minangkabau. Rencana itu diawali dengan mengutus de Vries seorang pegawai *Kantoor voor Inlandsche Zaken*⁴⁰ ke daerah ini untuk menjajaki kemungkinan diterapkannya ordonansi tersebut. Ada perbedaan sikap dikalangan pemuka masyarakat yang ditemui de Vries. Sebahagian ulama *Kaum Tua* seperti Sulaiman Ar Rasuli, Syeikh Djamil Djaho, dan Syeikh Khatib Ali agak ragu-ragu memberikan jawaban. Mereka minta waktu untuk mempelajarinya terlebih dahulu. Sikap ulama-ulama yang tidak tegas ini menimbulkan kejengkelan di kalangan ulama *Kaum Muda* khususnya Syekh Haji Abdul Karim Amrullah (Haji Rasul) yang dengan tegas menyatakan penolakannya dan berusaha keras untuk menggagalkan rencana usaha pemerintah kolonial itu.⁴¹

Perlawanan Haji Rasul terhadap *Goeroe Ordonantie* diawali dengan mengadakan pertemuan tertutup dengan ulama *Kaum Muda* dan beberapa orang bekas muridnya pada tanggal 14 Juni 1928 di *Surau* Syekh Jamil Jambek di Bukittinggi. Pertemuan tersebut memutuskan untuk menolak pemberlakuan ordonansi tersebut di seluruh wilayah Minangkabau dalam bentuk aksi massa pada tanggal 19 Agustus 1928. Seluruh ulama Minangkabau beserta pemuka-pemuka masyarakat lainnya akan diundang untuk menghadiri aksi tersebut.⁴²

⁴⁰ Lembaga itu merupakan perwujudan dari perluasan tugas seorang penasehat (*adviseur*) yang segala sesuatunya diatur dalam peraturan atau instruksi resmi pemerintah kolonial dan berada di bawah pengawasan Departemen Agama dan Pendidikan yang kantornya berada di Batavia (Jakarta). Tugas utama seorang penasehat ini adalah melakukan studi tentang lembaga-lembaga Islam.

⁴¹Lihat, Hamka, *Ayahku.....*, h. 167.

⁴²Imran Jamil dan Haji Abdul Malik Karim, *Peringatan (Verslag) dari Madjelis Permoesjawaratan 'Oelama Minangkabau' membitjarakan 'Goeroe Ordonantie' pada tanggal 19 Agustus 1928 dan 'Madjelis*

Konsolidasi kekuatan segera dijalankan. Pelajar-pelajar sekolah Sumatera Thawalib ditugaskan untuk menghubungi ulama Minangkabau baik dari kalangan *Kaum Muda* maupun *Kaum Tua* dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya supaya dapat menghadiri pertemuan.⁴³ Kecuali itu, para pelajar itu juga ditugaskan untuk mempengaruhi guru-guru agama dan ulama serta pemuka masyarakat lainnya agar menolak rencana *Goeroe Ordonantie* yang ketika itu juga sedang giat-giatnya dipropagandakan de Vries.

Sesuai rencana, pada tanggal 19 Agustus 1928 ulama-ulama Minangkabau dan pemuka masyarakat lainnya berkumpul di dalam *Surau* Syekh Djamil Djambek di Bukittinggi.⁴⁴ Laporan pemerintah menyebutkan tidak kurang dari 800 orang hadir dalam pertemuan tersebut. Peserta berasal dari 115 organisasi agama dan umum. Bahkan, de Vries dan beberapa pejabat tinggi pemerintah lainnya juga hadir.

Sebanyak 23 orang tampil sebagai pembicara, 17 orang dari *Kaum Muda*, 5 orang dari *Kaum Tua*, dan seorang dari kaum adat.⁴⁵ Abdul Madjid selaku ketua panitia mendapat kesempatan pertama berorasi. Ia menjelaskan maksud dan tujuan diselenggarakannya pertemuan tersebut dan mengajak semua hadirin untuk menolak pelaksanaan Guru Ordonansi.⁴⁶ Pembicara lainnya yakni Soetan Mangkoeto menyerukan hal yang

Permoesjawaratan 'Oelama' pada tanggal 4 November 1928 menerima Verslag Perdjalan Oetoesan mehadap Toean Gouverneur Generaal, (Fort de Kock: Boekhandel en Taman Poestaka "Sumatra Thawalib", 1928) h. 2.

⁴³*Mailrapport*, No. 227x/33, ANRI No. 29.

⁴⁴Djamil dan Malik, *Peringatan.....*, h. 1.

⁴⁵*Mailrapport*, No. 316x/29, ANRI no. 9.

⁴⁶Djamil dan Malik, *Peringatan.....*, h. 2.

sama yakni tolak Guru Ordonansi.⁴⁷ Orasi Haji Rasul dengan tegas mengajak seluruh masyarakat Minangkabau menolak *Goeroe Ordonantie* dan meminta kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda agar tidak menerapkan ordonansi tersebut di seluruh *Alam Minangkabau*. Selain itu Haji Rasul juga mengingatkan akan bahaya perpecahan umat sebagai efek dari *Goeroe Ordonantie* dapat mengganggu perkembangan Islam. - Pidato Haji Rasul ini disampaikan dengan penuh semangat dan telah memberikan kesan yang mendalam bagi hadirin dan tidak sedikit hadirin yang menangis setelah mendengar pidato itu.⁴⁸ Berbeda dengan pembicara-pembicara sebelumnya, orasi beberapa orang ulama *Kaum Tua* justru mengajak hadirin untuk sementara waktu menerima ordonansi tersebut, jika ada terasa yang memberatkan baru dimintakan pertimbangannya kepada pemerintah.⁴⁹

Pertemuan bersejarah itu memutuskan untuk menolak pemberlakuan *Goeroe Ordonantie* di seluruh *Alam Minangkabau*. Hasil pertemuan itu akan dilaporkan secara tertulis kepada Gubernur Jendral Hindia Belanda di Buitenzorg (Bogor) dan tembusannya ditujukan kepada *volkstraad* dan *Kantoor Voor Indlandsche Zaken* keduanya di Jakarta, dan Majelis Tinggi di Nederland. Berdasarkan laporan itu Gubernur Jendral menyatakan bahwa pemerintah Hindia Belanda tidak akan memberlakukan *Ordonansi Goereo* di Minangkabau.⁵⁰

⁴⁷Djamil dan Malik, *Peringatan.....*, h. 4-6.

⁴⁸Djamil dan Malik, *Peringatan.....*, h. 8-9, Hamka, *Ayahku...*, h. 170.

⁴⁹*Tjaja Soematra*, No. 259, 9 November 1928.

⁵⁰*Tjatja Soematra*, No. 246, 25 Oktober 1928; *Mailrapport*, No: 64x/28, ANRI No.9; 870x/28, ANRI No. B/38; 966x/28, ANRI, No. 9.

KESIMPULAN

Penerapan *politik etis* (*etische politiek*) oleh pemerintah Kolonial Hindia Belanda pada awal abad ke dua puluh mempunyai arti yang sangat penting dan strategis bagi masyarakat Minangkabau. Sebab, kebijakan itu membuka peluang bagi bangkitnya kesadaran nasionalisme masyarakat Minangkabau. Tanpa disadari oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, *politik etis* telah menstimulasi munculnya elit-elit baru dari kalangan masyarakat Minangkabau. Elit-elit baru di kalangan masyarakat Minangkabau diperkuat dengan dinamika keagamaan yang dipelopori oleh ulama-ulama Minangkabau yang mendapatkan pendidikan agama melalui surau-surau di berbagai daerah di Minangkabau dan pendidikan agama di Mekkah.

Akar Nasionalisme di Minangkabau dapat ditelusuri sejak abad ke 19 Masehi pada peristiwa Perang Padri. Gerakan Nasionalisme yang dilakukan oleh Kaum Padri bersifat perlawanan fisik (peperangan) terhadap kolonial Belanda. Kemudian pada awal abad ke 20 Masehi, gerakan Nasionalisme masyarakat Minangkabau mengalami pergeseran menjadi gerakan Sosio-Agama dan Sosio-Politik. Gerakan Nasionalisme ini ditandai dengan munculnya elit-elit baru masyarakat minangkabau yang mendapatkan pendidikan pada sekolah-sekolah yang didirikan oleh para ulama Minangkabau. Dalam perkembangannya, Gerakan nasionalisme di Minangkabau yang dilandasi oleh spirit Keislaman berhasil menggagalkan upaya pemerintah kolonial yang membatasi ruang gerak elit-elit agama di daerah ini.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abdul Choliq Murod, “ Nasionalisme dalam Perspektif Islam”. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, vol. 16, No. 2, Agustus 2011.

- Abdul Munir Mul Khan. *Nasionalisme; Refleksi Kritis Kaum Ilmuan*, .Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Ahmat Adam, *The Vernacular Press and the Emergence of Modern Indonesia Consciousness 1855-1913*. Ithaca, New York: Southeast Asia Program Cornell University, 1995.
- Aqib Suminto. *Politik Islam Hindia Belanda: Kantoer voor Indlandsche Zaken*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- B.J.O. Schrieke. *Pergolakan Agama di Sumatera Barat: Sebuah Sumbangan Bibliografi*, terj. Soeganda Purbakawatja. Jakarta: Bhratara, 1973. 12.
- Badri Yatim, *Soekarno, Islam dan Nasionalisme*. Jakarta: Logos, 1999.
- Bedjo Riyanto, *Iklan Surat Kabar dan Perubahan Masyarakat di Jawa Masa Kolonial 1870-1915*. Yogyakarta: Tarawang, 2000.
- Benedict Anderson, *Imagined Communities: Reflection on the Origin and Spread of Nationalism*. London and New York: Verso, 1991.
- Burhanuddin Daya, *Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam: Kasus Sumatera Thawalib*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990.
- Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES, 1996.
- Edwar (ed.), *Riwayat Hidup dan Perjuangan 20 Ulama Besar Sumatera Barat*, Padang: Islamic Centre Sumatera Barat, 1981.
- Elliot Parker, "Indonesia", dalam Kurian, *World Press Encyclopaedia*. London: Mansell, 1982.
- Francis Fukuyama, *Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal*, terj. Yogyakarta: Qalam, 2004.
- Grendi Hendrastomo. "Nasionalisme VS Globalisasi: Hilangnya Semangat Kebangsaan dalam Perdaban Modern". *Jurnal Dimensia*, vol. 1, No. 1, Maret 20017.
- Hamka, *Ayahku: Riwayat Hidup DR. H. Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera*. Jakarta: Umminda, 1982.
- Hans Kohn, *Nasionalisme: Arti dan Sejarahnya*, terj. Jakarta: Erlangga, 1984.
- Imran Jamil dan Haji Abdul Malik Karim, *Peringatan (Verslag) dari Madjelis Permoesjawaratan 'Oelama Minangkabau' membitjarakan 'Goeroe Ordonantie' pada tanggal 19 Agustus 1928 dan 'Madjelis Permoesjawaratan 'Oelama' pada tanggal 4 November 1928 menerima Verslag Perdjalanen Oetoesan mehadap Toean Gouverneur Generaal*. Fort de Kock: Boekhandel en Taman Poestaka "Sumatra Thawalib", 1928.
- Leo Suryadinata, "Tjiri-Tjiri Chas Pergerakan Nasional Indonesia sebelum Perang", *Makalah Seminar Nasional II 26-29 Agustus 1970 di Yogyakarta*.
- Lihat dalam Sartono Kartodirdjo, *Perkembangan Peradaban Priyayi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1987.
- M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, terj. Dharmono Hardjowidjono. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993.
- M.D. Mansoer (dkk), *Sedjarah Minangkabau*, Jakarta: Bhratara, 1970.

Maillrapport no. 812/30, ANRI No.9.

- Mailrapport*, No. 227x/33, ANRI No. 29
- Mailrapport*, No. 316x/29, ANRI No. 9.
- Mailrapport*, No. 870x/28, ANRI No. B/38
- Mailrapport*, No. 966x/28, ANRI, No. 9.
- Mailrapport*, No: 64x/28, ANRI No.9.
- Medan Ra'jat*, No. 2, 10 September 1932.
- Medan Ra'jat*, No. 9, 20 November 1932
- Mifdal Zusran Alfaqi, "Memahami Indonesia Melalui Perspektif Nasionalisme, Politik Identitas, serta Solidaritas". *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol. 28 No. 2, Agustus 2015.
- Politiek Politionale Overzich van de Residen Sumatra Westkust 2de Kwartal 1930.
- R.Z.Leirissa, *Terwujudnya suatu Gagasan Sejarah Masyarakat Indonesia 1900-1950*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.
- Rengga Satria. " Dari Surau Ke Madrasah: Modernisasi Pendidikan Islam di Minangkabau 1900-1930 M". *Tadris: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 14 No. 2, 2019.
- Rengga Satria. "Pembaruan Pendidikan Islam di Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang". *Jurnal Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 6 No. 1, 2019.
- Robert van Niel, *Munculnya Elit Moderen Indonesia*, terj.Zahara D.Noer, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984), h. 51 dan Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda: Kantoer Voor Inlandsche Zaken*, Jakarta: LP3S, 1985.
- Sanusi Lathief, "Gerakan Kaum Tua Minangkabau", *Disertasi*, (Jakarta: Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1988)
- Sartono Kartodirdjo, *Gerakan Ratu Adil*. Jakarta: Sinar Harapan, 1984.
- Sartono Kartodirdjo, *Pembangunan Bangsa*, Yogyakarta: Adutya Media, 1993.
- Sartono Kartodirdjo, *Pembangunan Bangsa*. Yogyakarta: Aditya Media,1993).
- Sidi Ibrahim Boechari, *Pengaruh Timbal Balik antara Pendidikan Islam dan Pergerakan Nasional di Minangkabau*. Gunung Tiga: Jakarta, 1981.
- Staatsblad van Nederlandsch Indie* No. 219, tahun 1925.
- Susmihara. "Islam dan Nasionalisme di Indonesia: Sebuah Tinjauan Sejarah". *Jurnal Rihlah*, vol. 4, No.1, 2016.
- Taufik Abdullah, *Schools and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatra 1927-1933*.Ithaca, New York: Cornell University, 1971.
- Tjaja Soematra*, No. 259, 9 November 1928
- Tjatja Soematra*, No. 246, 25 Oktober 1928.

